BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹ Pada prinsipnya seorang anak itu harus mendapatkan perlindungan sehingga kita sebagai warga masyarakat harus ikut serta menjaga agar jangan sampai anak menjadi korban tindak pidana atau bahkan sebagai pelaku tindak pidana.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan

¹ Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan bimbingan dan pembinaan dalam sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua/wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.²

Terkait dengan penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini Indonesia telah menetapkan adanya Undang-undang Peradilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih

² Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran, tugas dan peran masyarakat, pemerintah serta lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya sebagai wujud pembaharuan dari Undang-undang tersebut lahirlah Undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam Undang-undang yang baru ini terdapat banyak perubahan-perubahan di dalamnya. Perubahan yang paling mencolok adalah diterapkannya proses diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak serta pendekatan Keadilan Restoratif yang melibatkan seluruh stake holder terutama masyarakat dalam membantu proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak nakal, UU sistem peradilan pidana anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Dalam hukum positif di Indonesia sebenarnya telah diakui adanya sanksi selain pidana yaitu tindakan. Meskipun didalam KUHP Pasal 10 hanya mengatur *single track system* yaitu sanksi pidana saja. Ini membuktikan bahwa dalam UU sistem peradilan pidana anak terdapat salah satu cara mediasi penal untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sanksi tindakan dalam UU sistem peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 82 yaitu berupa pengembalian terhadap orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan dirumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, perawatan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Ditinjau dari teori-teori pembedaan, sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan karena dengan beranggapan bahwa suatu

pemidanaan dapat mencapai tiga hal, yakni untuk melindungi tata tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan. Sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan itu lagi. Singkatnya, sanksi pidana merupakan implementasi dari pengenaan sanksi pidana pada pelaku dan sanksi tindakan berorientasi pada keamanan dan perlindungan masyarakat.

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" *Relationship*. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader straftecht*". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun

suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa istilah baru yang tidak dikenal di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, diantaranya adalah diversifikasi dan *restorative justice*. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sementara *restorative justice* yang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak dikenal dengan istilah keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keberadaan Diversi dan Restoratif justice di Indonesia yang masih tergolong baru tersebut tentunya membutuhkan kajian yang mendalam, sehingga berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul:

***“Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak
di Pengadilan Negeri Wonosobo”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wonosobo?
2. Apakah yang menjadi hambatan terhadap penerapan *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wonosobo?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan terhadap penerapan *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak di Pengadilan negeri Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan di dalam usulan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan di dalam rumusan permasalahan, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wonosobo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan *restorative justice* tersebut pada penanganan perkara tindak pidana anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo.
3. Untuk memberikan penjelasan dan analisis bagaimana cara mengatasi hambatan terhadap penerapan *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak di Pengadilan negeri Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik dari aspek akademis maupun dari aspek sisi praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, maka penelitian ini dapat merupakan sumbangan pemikiran tentang pengembangan ilmu hukum tentang sistem peradilan pidana anak dengan pembahasan mengenai penerapan asas *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kepentingan penegak hukum, maka penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum sebagai petunjuk mengimplementasikan dan menerapkan *restorative justice* dalam praktik sistem peradilan pidana anak. Secara spesifik dalam hal ini adalah Hakim dan juga institusinya, menyangkut di dalamnya kelembagaan Mahkamah Agung dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi Hakim yang mengadili perkara anak di Pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding maupun pengadilan pada tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali.
- b. Bagi masyarakat umum, maka penelitian ini dapat dipergunakan sebagai informasi tentang *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Masyarakat dalam hal ini baik sebagai keluarga korban, keluarga pelaku ataupun masyarakat pada umumnya dapat mengetahui tentang penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak atau kasus anak dan selanjutnya masyarakat akan mengetahui fungsi dan tujuan dari *restorative justice* dalam penanganan perkara anak.

E. Kerangka Konseptual/Kerangka Berpikir

1. Konsep Tentang Keadilan Restoratif (*RESTORATIVE JUSTICE*)

Konsep *Restorative justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya

pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui muiyawah pemulihan, proses peradilan baru berjalan. Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyaai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan *restorative justice* serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi ke dalam undang-undang perlindungan anak.

Sementara *restorative justice* yang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 dikenal dengan istilah keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restorative justice ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Tindak pidana melanggar orang dan hubungannya;
- b) Pelanggaran menimbulkan kewajiban;
- c) Proses mengikutsertakan korban, pelaku dan masyarakat untuk berusaha mengembalikan ke tempat yang benar.
- d) Fokus pada kebutuhan korban dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian.

Pada tahun 1980an, Braithwaite memperkenalkan sistem penghukuman dengan pendekatan *restorative justice*, karena terinspirasi oleh masyarakat Maori dalam menangani penyimpangan di lingkungan mereka, yang menekankan penyelesaian masalah dengan melibatkan masyarakat dan petinggi masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Proses dari *restorative justice* dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), dan *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya).

Tujuan-tujuan peradilan bagi anak terkait proporsionalitas antara pelanggaran hukum dan pelanggaran hukumnya perlu diperhatikan.

Restorative justice berlandaskan pada prinsip *due process*, yang merupakan eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan, yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka dan sangat memperhatikan kepentingan korban. Sasaran peradilan restoratif adalah mengharapkan berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara serta menghapuskan stigma pada diri anak dan mengembalikan anak menjadi manusia yang normal sehingga dapat berguna di kemudian hari.

Restorative justice mengakui 3 (tiga) pemangku kepentingan dalam menentukan penyelesaian perkara anak, yaitu : (1) korban; (2) pelaku; (3) komunitas. Khusus dalam hal tindakan pencegahan.

2. Konsep Mengenai Tindak Pidana Anak

a. Tindak Pidana

Apabila kita perhatikan di pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang (UU) Pidana yang dibentuk oleh pemerintah tidak ditemukan mengenai definisi tindak pidana (*delik*) dan pertanggung jawaban pidana.³ Padahal dengan mengerti mengenai pengertian tindak pidana maka dari situ dapat dimengerti pula mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana, dan dengan diketahuinya unsur-unsur dalam tindak pidana maka dapat diketahui apakah perbuatan seseorang tersebut dikatakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana.

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara anglo saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *WvS* Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.⁴ Namun ternyata istilah tersebut tidak mutlak disetujui dan digunakan oleh para ahli hukum

³ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*; Refika Aditama, Bandung, hlm 74

⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, 1994, Jakarta, hlm.86.

di Indonesia, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. *Utrecht* menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana.⁵

Adapun menurut Moeljatno, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

Sudarto, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan (*crime atau verbrechen atau misdadad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁷

Mengenai tindak pidana (delik) tersebut, ada pendapat beberapa Sarjana Hukum, dan diantara pendapat-pendapat tersebut dapat dibagi menjadi 2 aliran yaitu **Aliran Monistik**, adalah pandangan sarjana yang memandang bahwa dalam perbuatan pidana meliputi pertanggungjawaban pidana dan **Aliran Dualistik**, adalah pandangan sarjana yang memandang bahwa adanya pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau adanya *mens rea*) dan dapat

⁵ *Ibid*, hlm.86

⁶ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, 2009, Jakarta, hlm.59

⁷ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cet.2, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm.40.

dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau adanya *mens rea*). Aliran monodualistik ini melepaskan unsur kesalahan dari segi perbuatan dan memasukkannya ke dalam segi si pembuat.⁸

b. ANAK

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa pengertian anak berdasarkan hukum positif Indonesia ditinjau dari aspek yuridis lazim diartikan sebagai anak yang belum dewasa (*minderjarig/person underage*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁹

Untuk mengkualifikasikan seseorang itu masuk kategori anak ataukah bukan, maka memerlukan parameter yang dijadikan sebagai ukuran, yaitu dengan adanya batasan umur anak. Di Indonesia sendiri untuk batasan anak diatur dan terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ternyata masing-masing Undang-undang yang ada tidak terdapat suatu kesesuaian mengenai batas umur anak, berikut ini adalah merupakan batasan umur anak, dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya mengenai Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut

:Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, 2009, Bandung, hlm 77.

⁹ Lilik Mulyadi, *op.cit*, hlm. 3-4

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, usia anak terkait dengan anak sebagai pelaku tindak pidana diatur di dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini terhadap Pasal tersebut sudah dicabut, yang mana di dalam Pasal tersebut batasan umur orang belum dewasa adalah sebelum berumur 16 (enam belas) tahun. Adapun apabila dilihat usia anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari sudut pandang korban kejahatan, maka batasan umur usia anak adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan BAB XIV yaitu Pasal 287, 290, 292, 294 dan 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari segi korban, usia anak adalah 15 Tahun.

1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 ini, batasan umur anak diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Dalam Pasal tersebut, yang dimaksud dengan anak adalah : seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Di dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa batasan usia anak yang bisa disumpah sebagai

saksi di sidang Pengadilan adalah 15 tahun dan belum pernah kawin, dan di dalam Pasal 153 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menerangkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak ini, untuk batasan umur anak diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Terhadap ketentuan pasal ini, telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menaikkan batas minimal usia anak yang bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, dimana dalam putusannya tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian terhadap pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010, yang dimohonkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, anak dapat dikategorikan sebagai “Anak Nakal” bukan merupakan proses tanpa prosedur dan dapat dijustifikasi oleh setiap orang. Pemberian kategori “Anak Nakal” merupakan justifikasi yang dapat dilakukan melalui sebuah proses peradilan yang standarnya akan ditimbang dan dibuktikan di muka hukum. dengan perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun maka Mahkamah berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum (*minimum age floor*) bagi Anak Nakal (*deliquent child*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang menyatakan, “*Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin*”. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pasal *a quo* tidak dimintakan pengujiannya oleh para Pemohon, namun Pasal *a quo* merupakan jiwa atau ruh dari Undang-Undang Pengadilan Anak, terutama Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak, sehingga batas umur minimum juga harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yakni 12 (dua belas) tahun.

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Bahwa yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Istilah anak yang berkonflik dengan hukum ini sendiri dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelumnya istilah tersebut telah dikenal dengan istilah lain yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dikenal dengan istilah "Anak Nakal".

Adapun yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan BAB I.KETENTUAN UMUM, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Konsep Penerapan *Restorative justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Anak.

Penerapan *Restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-

nilai keadilan pada penyelesaian kasus-kasus pidana yang mendudukan anak-anak sebagai pelaku. Selama ini anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan secara pidana pula, yakni dengan pemenjaraan dengan maksud memberi efek jera pada diri anak-anak, namun pemenjaraan telah memasung sebagian besar hak anak.

Restorative justice memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana karena *restorative justice* menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut, perlu dilakukan dialog-dialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali si anak dalam masyarakat.

Restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu penyelesaian dengan mempergunakan konsep *restorative justice* yaitu dengan melibatkan semua komponen lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum bersama-sama bermusyawarah untuk menentukan tindakan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. Penyelesaian ini bertujuan untuk memulihkan kembali kerugian yang telah ditimbulkan. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang diberikan yaitu ganti rugi materi, kerja sosial, pendidikan dan pelatihan yang

berguna bagi anak. *Restorative justice* dapat dilakukan di Indonesia. Adapun faktor pendukung yaitu sebagian aparat penegak hukum telah melakukan tindakan diversifikasi dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana berdasarkan kebijakan individu sedangkan didalam masyarakat sendiri dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak telah menerapkan nilai-nilai yang sama dengan konsep *restorative justice*, Selanjutnya adanya dukungan dari aparat penegak hukum, pemuka agama, pemuka adat, akademisi dan lembaga perlindungan anak.

Namun dalam hal ini *Restorative justice* dalam sudut pandang penulis bukan hanya dilihat dari adanya pelaksanaan diversifikasi saja, akan tetapi pelaksanaan *restorative justice* sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencerminkan keseluruhan proses penanganan perkara anak tersebut bahkan sampai ke penjatuhan Putusan dalam sidang pengadilan.

Adapun kerangka konseptual dalam hal penelitian ini adalah tentang konsep *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya konsep *restorative justice* yang dipakai sebagai dasar suatu putusan pengadilan. Konsep *Restorative justice* yang dipakai sebagai dasar suatu putusan pengadilan pada dasarnya berbeda dengan konsep *restorative justice* pada umumnya. Sehingga konsep *restorative justice* yang dipakai pada pengertian ini adalah *Restorative justice* dalam putusan pengadilan yang merupakan *framework* bagi Hakim dalam melihat bagaimana suatu perkara harus diputus dengan mengacu pada

pemahaman putusan sebagai respon atas suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan putusan Pengadilan, maka putusan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah :¹⁰

“Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Adapun konsep *Restorative justice* yang dipakai sebagai dasar Putusan Pengadilan ini berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam *restorative justice* sebagai tujuan pemidanaan, hal tersebut diatur dalam Pasal 54 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :¹¹

- (1) Pemidanaan bertujuan :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pegayoman masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran RI Tahun 1981 No.76, Tambahan Lembaran Negara No.3209.

¹¹ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012.

bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun dalam berbagai putusan pengadilan yang menerapkan *restorative justice*.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai obyek penelitian dan juga penerapannya. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal kemudian dianalisa berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penulisan tesis ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu hal yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat. Oleh karena itu pendekatan

sosiologi hukum terhadap hukum pidana khusus yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana prinsip *restorative justice* diterapkan dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Wonosobo
- b. Untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kenyataannya diterapkan keadilan *restorative* dan apa dasar pertimbangan penegak hukum memilih solusi tersebut.
- c. Untuk mengetahui apa hambatan dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang akan dipergunakan lebih dititikberatkan pada sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari para responden sebagai narasumber yang ditetapkan sebagai sampel, dan data tersebut diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*) kepada Hakim Anak yang bertugas di Pengadilan Negeri Wonosobo.

Selain sumber data primer, Penulis juga akan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Norma atau dasar falsafah, yaitu Pancasila

- 2) Pembukaan Dasar, yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 3) Undang-Undang Meliputi: Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil-hasil penelitian (melalui wawancara), dan seterusnya
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, media internet.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari para responden sebagai narasumber yang ditetapkan sebagai sampel, dan data tersebut diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*) kepada Hakim Anak yang bertugas di Pengadilan Negeri Wonosobo.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data telaah dari beberapa tulisan kritis dan artikel hukum yang sangat

update. Serta peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk teknik pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan analisis digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara yakni dilakukan teknik wawancara langsung yang dilakukan untuk memperoleh informasi guna melengkapi data. Wawancara juga merupakan suatu bentuk tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan subjek/responden yang diteliti sehingga proses tanya jawab tersebut di dapat suatu informasi yang lengkap dan benar sehingga berguna dan menunjang penelitian
- b. Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan data dan bahan-bahan yang muatannya sangat berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan catatan-catatan serta dokumen-dokumen yang penting di lapangan yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian

6. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang akan dibahas.

Data primer yang terkumpul, oleh penulis akan disajikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan yang ada.

Selanjutnya data yang telah tersusun secara sistematis tersebut akan dilakukan analisis data untuk menjawab permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis sosiologis. Pendekatan hukum yuridis sosiologis yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan Hakim Anak lalu dikaji melalui teori-teori maupun peraturan perundang-undangan yang ada, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran dan fungsi lembaga-lembaga peradilan dan keseluruhan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai masalah pengadilan anak dan juga perlindungan anak, konvensi-konvensi internasional serta perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan masalah anak, akan diarahkan pada pendekatan yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif, antara lain dilakukan melalui kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan. Dalam analisis kualitatif dapat dilakukan interpretasi data yang bersifat deskriptif semata atau analitik.¹²

Data-data yang diperoleh tersebut dianalisis sehingga menghasilkan suatu jawaban atau solusi atas permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian dan kemudian memberikan solusi atau rekomendasi dari permasalahan yang berkaitan dengan penerapan

¹² Maria SW. Sumardjono *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*; Universitas Gadjah Mada, 2012, Yogyakarta, hlm. 33

restorative justice dalam penanganan perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wonosobo.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini terdiri dari yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Konseptual/Kerangka Berfikir, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai Kajian Pustaka / Tinjauan Teoretik berupa teori-teori yang relevan dengan Pengertian Restoratif Justice dan segala hal mengenai restoratif justice serta pengertian mengenai anak, Tindak Pidana Anak dan aturan-aturan yang mengatur mengenai tindak pidana anak serta pandangan Hukum Islam terhadap penerapan *restorative justice* tersebut dalam penanganan perkara tindak pidana anak di Pengadilan negeri Wonosobo.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai hasil penelitian dan Pembahasan yang mengulas mengenai mengenai bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana anak di Indonesia, apa saja hambatan dalam penerapan *restorative justice* tersebut serta bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan yang timbul

dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wonosobo.

BAB IV PENUTUP

Meliputi kesimpulan penelitian dan saran atau solusi dari permasalahan terkait.